

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kawasan perkotaan metropolitan sebagai simpul kegiatan skala besar memiliki nilai yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah dan perekonomian nasional. Kawasan perkotaan metropolitan ditetapkan sebagai kawasan tertentu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang RTRWN. Dalam Revisi RTRWN yang tengah dalam proses legalisasi pun, kawasan perkotaan metropolitan tetap dipandang sebagai kawasan strategis nasional ([www.metropolitan.jabarprov.go.id](http://www.metropolitan.jabarprov.go.id)., 2013).

Kawasan perkotaan metropolitan memiliki arti pengembangan wilayah dan perekonomian nasional terkait dengan peran kawasan perkotaan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang luas serta skala kegiatan ekonomi yang berkembang di dalamnya. Kawasan metropolitan dituntut untuk mampu berfungsi secara efektif sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang efisien sehingga dapat menunjang upaya percepatan pembangunan nasional. Inefisiensi dalam pengelolaan kawasan perkotaan dikhawatirkan dapat berdampak pada penurunan kinerja pembangunan dalam skala yang lebih luas, bahkan nasional ([www.metropolitan.jabarprov.go.id](http://www.metropolitan.jabarprov.go.id)., 2013).

Metropolitan Bandung, sebagaimana tercantum dalam PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN 2015 dan Perda 2 Tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Barat 2010, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN,

Metropolitan Bandung, selain akan berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Internasional, juga akan berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi dengan skala Sistem penataan ruang dan lingkungan pelayanan nasional atau beberapa provinsi ([www.metropolitan.jabarprov.go.id](http://www.metropolitan.jabarprov.go.id)., 2013).

Pada skala regional, Metropolitan Bandung juga merupakan kawasan andalan, yaitu kawasan yang berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi ke kawasan sekitarnya. Berbagai fungsi di atas timbul sebagai akibat perkembangan yang pesat dari kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang telah tumbuh sejak beberapa dekade sebelumnya. Semua ini telah menjadikan kota Bandung sedemikian menarik, tidak hanya bagi penduduk yang berasal dari Jawa Barat sendiri tetapi dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk ini, sektor ekonomi sebagai sektor yang memiliki responsivitas paling tinggi terhadap kebutuhan penduduk, semakin melaju pertumbuhannya, dan telah menjadikan kota Bandung sebagai kota metropolitan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya ([www.metropolitan.jabarprov.go.id](http://www.metropolitan.jabarprov.go.id)., 2013).

Fakta tersebut, sebenarnya bisa dibuktikan langsung dengan menelusuri gang-gang di pinggir jalan utama. Atau gang-gang yang mengarah ke pemukiman penduduk di belakang pusat perbelanjaan dan gedung tinggi. Satu hal yang akan ditemukan dalam penelusuran tersebut, sudah pasti deretan rumah tanpa teras terlebih halaman. Jika demikian, adakah satu kawasan yang bisa dikatakan sebagai kawasan terpadat di Kota Bandung? Jawabnya tentu saja sebagian besar

kawasan di kota Bandung bisa dikatakan sebagai kawasan padat penduduk (sebandung.com, 2015).

Menilik dari sejarah, Kawasan Cicadas pernah dianugerahi gelar kawasan “terpadat” bukan hanya di Bandung tetapi di tingkat dunia. Pemberian gelar seperti ini secara langsung menunjukkan wilayah dengan tingkat sanitasi terburuk hingga angka kriminalitas yang tinggi. Di masanya, hal ini mungkin saja wajar mengingat Cicadas merupakan pusat keramaian dan pembangunan Kota Bandung. Banyak fasilitas umum yang pernah ada di tempat ini, mulai dari pasar, pertokoan, hiburan hingga terminal (sebandung.com, 2015).

Namun, jika menilik perkembangan Bandung saat ini, sebagian besar wilayah kiranya hampir sama dengan Cicadas di masa lalu. Bahkan jika melihat fakta yang ada saat ini, wilayah lain ternyata memiliki tingkat kepadatan yang lebih parah dari Cicadas. Yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan ini secara visual adalah lebar jalanan atau gang di pemukiman. Jalan atau gang di pemukiman Cicadas, umumnya masih muat untuk dilintasi dua motor dengan arah berlawanan, namun tidak untuk mobil.

Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, suara. Sementara komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri). Dengan demikian, lingkungan adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan kegiatan mereka, yang terkandung dalam ruang di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengungkap bagaimana keterkaitannya antara wilayah padat penduduk dengan kondisi lingkungan hidup, yang dituangkan dalam judul penelitian "*Penataan Kota Wilayah Padat Penduduk Berbasis Lingkungan Hidup (Kajian di RW 08 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler).*"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran konsep penataan kota di wilayah padat penduduk RW 08 Kelurahan Suka Asih Kota Bandung?
2. Bagaimana hambatan penataan ruang kota Di RW08 Kelurahan Suka Asih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang penataan kota di wilayah padat penduduk RW 08 Kelurahan Suka Asih.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan penataan kota di wilayah padat penduduk RW 08 Kelurahan Suka Asih.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi padat penduduk di wilayah kelurahan Suka Asih RW 08.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut dan sebagai data dasar bagi perkembangan sistem penataan kota wilayah padat penduduk di RW 08 kelurahan Suka Asih.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Struktur sosial di kalangan ahli di Indonesia memang belum ada kesepakatan untuk menentukan secara pasti tentang definisinya. Sebagaimana para ahli menganggap bahwa struktur sosial dapat disebut dengan istilah pranata sosial, bangunan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Dari pendapat tersebut bisa diartikan bahwa struktur sosial mencakup berbagai hubungan sosial antara individu-individu secara teratur pada waktu tertentu yang merupakan keadaan statis dari suatu sistem sosial. Jadi struktur sosial tidak mengandung unsur kebudayaan belaka, mencakup prinsip-prinsip hubungan sosial yang bersifat tetap dan stabil.

Dalam sosiologi, struktur sosial sering digunakan untuk menjelaskan tentang keteraturan sosial, yaitu menunjuk pada prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. Soerjono Soekanto (2012: 197) mengatakan bahwa struktur sosial adalah hubungan timbal balik dalam posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial.

Struktur sosial secara singkat dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya berkandung hubungan timbal balik antara status dengan peranan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang merujuk kepada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.

Norma menurut Alvin L. Bertrand (1980) adalah suatu standar dalam tingkah laku yang terdapat dalam semua masyarakat. Dalam definisi tersebut kita mengambil bahwa tingkah laku masyarakat memang penting dalam pergaulan karena setiap manusia mempunyai adat dan perilaku yang sesuai norma dan nilai yang berlaku.

Nilai sosial sebagai penggambaran dalam kecenderungan terhadap apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Maksudnya adalah bahwa nilai itu sebagai gambaran ke depan supaya manusia dapat melakukan kesukaan sendiri dan orang lain atau sebaliknya.

Struktur sosial hampir sama dengan organisasi sosial dikarenakan disana apabila disamakan dalam kekerabatan, kelembagaan atau hukum pada masyarakat karena telah dipaparkan menurut Firth (dalam Soekanto, 2012: 291) bahwa organisasi sosial berkaitan dengan pilihan-pilihan dan keputusan dalam hubungan-

hubungan aktual, struktur sosial mengacu kepada hubungan-hubungan sosial yang fundamental yang memberikan bentuk dasar dalam masyarakat.

Sosiologi aliran Fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa masyarakat merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, ada perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional.

Fungsional struktural terutama dalam karya-karya Talcott Parsons, Robert Merton, serta pengikut mereka mendominasi teori Sosiologi selama beberapa tahun. Namun dalam tiga dekade terakhir ini arti pentingnya telah merosot secara dramatis dan sekurang-kurangnya dalam berapal hal telah tenggelam dalam sejarah teori Sosiologi. Kemerosotan ini tercermin dalam deskripsi Colomy (1990an). Terutama fungsionalisme struktural sebagai “tradisi” teoretis. Fungsionalisme struktural kini hanya bermakna historis, meski juga berperan penting dalam melahirkan neofungsionalisme pada 1980-an (Nielsen, 2007:243). Setelah fungsionalisme struktural, neofungsionalisme muncul menggantikan sekaligus sebagai contoh gerakan menuju analisis sintesis dalam teori Sosiologi (Abrahamson, 2001:186).

Selama beberapa tahun alternatif untuk fungsionalisme struktural adalah teori konflik. Dalam versi tradisional, teori konflik adalah hasil analisis sintesis dan integratif yang lebih belakangan.

Sebelum beralih ke fungsionalisme struktural dan teori konflik yang spesifik kita perlu mengikuti Thomas Bernard (1983) untuk menetapkan konteks kedua teori ini dalam konteks pembahasan yang lebih luas antara teori konsensus (salah satu teorinya adalah struktural fungsional) dan teori konflik (salah satunya teori konflik sosiologis). Teori struktur fungsionalisme memandang norma dan nilai sebagai landasan masyarakat, memusatkan perhatian kepada keteraturan berdasarkan asas kesepakatan diam-diam dan memandang perubahan sosial terjadi secara terlambat dan teratur. Sebaliknya teori konflik menekankan pada dominasi kelompok sosial tertentu oleh kelompok lain, melihat keteraturan sosial didasarkan atas manipulasi dan control oleh kelompok dominan dan menurut cara yang tidak teratur ketika kelompok-kelompok subordinat menggulingkan kelompok yang semula dominan.

Robert Nisbet menyatakan teori struktural fungsionalisme adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang (Turner dan Maryanski, 1979:19).

Kingsley Davis (1959), berpendapat struktural fungsionalisme adalah sinonim dengan Sosiologi. Meski hegemoninya diragukan dalam dua dekade sesudah perang dunia ke II, teori struktural fungsional sebagai teori Sosiologi telah merosot arti pentingnya. Wilbert Moore yang sangat memahami teori ini menyatakan bahwa teori ini telah “menjadi sesuatu yang telah menjadikan dalam perkembangan teori sosiologi masa kini” (1978:321). Adapun dua pengamat lainnya menyatakan fungsionalisme sebagai teori yang bersifat menjelaskan, kami kira sudah ‘mati’ dan upaya untuk menggunakan fungsionalisme sebagai

penjelasan teoretis harus ditinggalkan dan mencari perspektif teoretis lain yang lebih memberi harapan (Turner dan Maryanski, 1979:141).

Sedangkan Demerath dan Peterson pada tahun 1967 lebih berpandangan positif, bahwa struktural fungsionalisme belum mati, tetapi mereka menambahkan bahwa teori ini dapat dikembangkan dari pemikiran organisme lebih awal. Dalam fungsionalisme struktural, istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan. Kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya (atau akibatnya) terhadap struktur lain. Begitu pula kita dapat meneliti fungsi sebagai proses sosial yang tidak mempunyai struktur. Asumsi ini dapat menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama.

Dalam grand teori sebagai wakil dalam sistem sosial hanya banyak kata yang tidak berguna atau apakah itu juga bakal di ajukan? Jawaban atas pertanyaan ini hanya 50%, 40% ada dalam buku Sosiologi yang terkenal, sedangkan yang lainnya 100%. Ketika Parsons mengatakan “saya rela tidak memeriksa empirisme pemeriksa dari saya hanya 10 persen dari kemungkinan meskipun dalam penggunaan ideologi masih terlihat samar-samar.”

Perubahan dari teori struktural fungsional di tunjukan dengan pertunjukan, setelah kajian Homans, dialah orang yang pertama memperkenalkan konstruksi fungsional dengan teori sistem sosial pada tahun 1951. Parsons lebih menitikberatkan pada tingkah laku sosialnya. C Wright Mills, salah seorang pendukung kuat Sosiologi tingkah laku kontemporer, membatasi serangannya ke dalam kutipan dan pernyataan dan menterjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih sempurna.

Menurut Marion J. Levy teori sosiologi fungsional muncul dalam sistem sosial dari Parsons, dan ketika Marion Levy menggunakan teori susunan sosial. Dalam susunan social, Levy berusaha mensintesis susunan analisis fungsi rumusan yang mengambil pandangan Merton dan Parsons. Parsons memahami fungsi sebagai keadaan atau urusan negara. Susunan dipahami sebagai pola atau menjalankan kegiatan yang seragam. Syarat fungsi didefinisikan sebagai kondisi umum untuk memelihara unit-unit yang digabungkan memberikan tingkatan pendefinisian unit dan meletakkan unit. Syarat struktur didefinisikan dengan pola kegiatan untuk dilanjutkan keberadaannya, serta dengan dikumpulkan. Di dalam persyaratan fungsional dan struktur, Levy juga mendefinisikan persyaratan fungsi dan struktur. Persyaratan fungsi dibangun dalam sebuah susunan yang harus di keluarkan jika unit itu datang (Ritzer, 2014: 34).